

PERAN INDONESIA DALAM MEMULIHKAN KRISIS EKONOMI GLOBAL DI DALAM FORUM G-20 (GROUP OF TWENTY)

Adi Ardiansyah¹, Sirwan Yazid Bustami², Kurnia Zulhandayani Rizki³

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

adiardiansyah724@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to describe Indonesia's role in recovering from the global economic crisis in the G-20 (Group of Twenty) forum. The global economic crisis is a serious challenge, and achieving sustainable recovery requires cooperation between countries. As a member of the G-20 forum, Indonesia plays an important role in mitigating the impact of the crisis and developing joint policies. This research examines Indonesia's role in recovering from the global economic crisis through its contribution to the G-20 forum. This research uses the concept of middle power diplomacy to understand Indonesia's foreign policy and the concept of national interests to analyze Indonesia's interests in the G-20 (Group of Twenty) forum. The author uses descriptive research, which is a research method that aims to explain an object. The author uses a qualitative research method which is a narrative interpretation of an event. This research aims to identify the strategies implemented and their impact on global economic recovery by analyzing the economic, diplomatic and international cooperation policies taken by Indonesia.

Keywords : *Indonesia's Role, Global Economic Crisis, G-20 Forum.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan apa saja peran Indonesia dalam memulihkan krisis ekonomi global di dalam forum G-20 (*Group of Twenty*). Krisis ekonomi global merupakan tantangan yang serius, dan mencapai pemulihan yang berkelanjutan dimana memerlukan kerjasama antar negara. Sebagai anggota forum G-20, Indonesia berperan penting dalam memitigasi dampak krisis dan mengembangkan kebijakan bersama. Penelitian ini mengkaji peran Indonesia dalam pemulihan krisis ekonomi global melalui kontribusinya pada forum G-20. Penelitian ini menggunakan konsep diplomasi *middle power* dimana untuk mengetahui kebijakan luar negeri Indonesia serta konsep kepentingan nasional untuk menganalisis apa saja kepentingan Indonesia di dalam forum G-20 (*Group of Twenty*) tersebut. Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yang merupakan salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu objek. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang merupakan interpretasi atas sebuah peristiwa secara naratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi yang diterapkan dan dampaknya terhadap pemulihan ekonomi global dengan menganalisis kebijakan ekonomi, diplomasi, dan kerjasama internasional yang diambil oleh Indonesia.

Kata Kunci : Peran Indonesia, Krisis Ekonomi Global, Forum G-20.

PENDAHULUAN

Krisis ekonomi global adalah peristiwa yang mempengaruhi semua bidang ekonomi pasar dunia yang mana mengalami kehancuran atau resesi dan industri lain di seluruh dunia. Krisis ekonomi global disebabkan oleh masalah keuangan di pasar dunia yang tidak dapat dihindari karena kebangkrutan atau situasi keuangan yang berantakan dan merugikan.¹ Efek ini dapat diamati di bidang keuangan penurunan aktivitas investasi dan perlambatan lapangan kerja.

Krisis ekonomi merupakan suatu keadaan dimana perekonomian suatu negara mengalami kemerosotan yang sangat signifikan. Krisis jenis ini dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti inflasi, deflasi, krisis keuangan, dan lain-lain. Hal ini dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi negara dan masyarakat. Krisis jenis ini lebih berbahaya dari pada resesi karena situasinya lebih buruk. Perekonomian memiliki dampak yang sangat besar baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Beberapa faktor sering dinyatakan dalam pengurangan biaya pemerintah, kenaikan harga pokok, penurunan nilai tukar tidak terkendali dan masih banyak permasalahan lainnya.²

Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1997-1998. Situasi Indonesia saat itu sangat kacau. Faktor keuangan nilai tukar rupiah terdegradasi karena faktor internal dan eksternal. Saat ini Indonesia sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Seperti kehadiran pandemi COVID-19 telah mengubah keadaan sosial khususnya di bidang keuangan dan perekonomian.³ Indonesia sedang menghadapi banyak permasalahan perekonomian akibat pandemi COVID-19. Kondisi perekonomian di Indonesia terlihat mengkhawatirkan, perekonomian global pada tahun 2020.⁴ COVID-19 juga telah mengganggu fungsi perekonomian global termasuk di Indonesia, beberapa perusahaan pernah mengalami penurunan penjualan barang, jasa atau bahkan menghentikan operasional.

Pandemi COVID-19 juga telah memberikan dampak luas terhadap perekonomian seluruh dunia. Pada tahun 2021 pun Indonesia mengalami krisis ekonomi yang merupakan akibat langsung dari krisis kesehatan yang sedang berlangsung.⁵ Dampak pandemi ini berdampak berbagai sektor perekonomian Indonesia, termasuk ketenagakerjaan, operasional bisnis, dan stabilitas keuangan yang sangat besar. Hal ini untuk mengkaji dampak spesifik pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia pada tahun 2021 dan menjajaki kemungkinan strategi untuk memitigasi dampak negatifnya. Memahami tantangan yang dihadapi

¹ Habibah Shobri, A. S. (2022). Strategi Negara-Negara G-20 Dalam Mengantisipasi Ancaman Krisis Ekonomi Global Di Indonesia. *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan*, hal. 5.

² Sugema, I. (2012). Krisis keuangan global 2008-2009 dan implikasinya pada perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*.

³ World Health Organization, Coronavirus Disease (Covid-19) Pandemic: Press Conference on Covid 19 and Other Global Health Issues, diakses dari <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>.

⁴ Zubaidah, T., Yendriani, Y., Putri, F. H., & Pangastuti, N. (2021). Krisis ekonomi bangsa Indonesia dimasa pandemi covid-19. *Jurnal Fusion*.

⁵ Voice of America Indonesia. 2021. *Ekonomi Indonesia di 2021*. 15 Januari. <https://www.voaindonesia.com/a/ekonomi-indonesia-di-2021-diprediksi-krisis-serius-/5737622.html>.

Indonesia dan menganalisis solusi yang mungkin dapat memberikan wawasan tentang cara mengatasi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya ini dan mendorong pemulihan yang berkelanjutan.

Pandemi COVID-19 memberikan dampak besar terhadap perekonomian Indonesia pada tahun 2021. Salah satu dampak utamanya adalah berkurangnya kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban kreditnya, termasuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Menyikapi situasi tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan aturan stimulus perekonomian nasional di masa pandemi yang diterapkan oleh masing-masing bank seperti Bank Tabungan Negara (Bank BTN). Menurunnya kemampuan debitur dalam membayar kembali pinjamannya dapat berdampak luas pada banyak sektor perekonomian. Kemampuan membayar tidak hanya berdampak pada individu, namun juga dunia usaha dan lembaga keuangan.⁶

Situasi ini dapat menyebabkan peningkatan kredit bermasalah, memberikan beban pada bank dan berpotensi berdampak pada kemampuan mereka untuk mengeluarkan pinjaman baru dan mendukung pemulihan ekonomi. Pemerintah Indonesia dan otoritas keuangan harus memantau dengan cermat tantangan-tantangan ini dan mengambil tindakan yang tepat, seperti restrukturisasi pinjaman, penambahan fasilitas kredit, atau konversi sementara pinjaman menjadi investasi ekuitas. Strategi-strategi ini dapat membantu meringankan sebagian beban ekonomi akibat pandemi dan memungkinkan proses pemulihan yang lebih lancar.⁷

Krisis ekonomi lainnya dapat disebabkan oleh banyak faktor yang kompleks dan saling terkait. Berikut adalah beberapa penyebab krisis ekonomi global Indonesia. Pertama, Utang yang berlebihan dan krisis keuangan, akumulasi utang yang tidak terkendali, baik di tingkat pemerintah, korporasi, atau individu, dapat menyebabkan krisis keuangan. Ketika hutang melebihi kapasitas pembayarannya atau terjadi kebangkrutan yang parah, hal ini dapat menciptakan ketidakstabilan sistem keuangan dan menyebabkan krisis ekonomi.⁸ Kedua, Perekonomian tidak seimbang, ketidakseimbangan ekonomi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti defisit perdagangan yang berkepanjangan, ketidakseimbangan neraca pembayaran, atau kesenjangan pendapatan yang signifikan antara kelompok sosial.

Ketidakseimbangan ini dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi jangka panjang dan berujung pada krisis. Ketiga, Krisis perbankan, kegagalan sistem perbankan atau kerentanan di sektor keuangan yang dapat menyebabkan krisis ekonomi. Ketika bank mengalami kesulitan likuiditas, meningkatnya kredit macet atau terjadi kepanikan di sektor perbankan. Hal ini dapat mengakibatkan berkurangnya akses terhadap kredit, hilangnya kepercayaan masyarakat dan menimbulkan krisis

⁶ Yenny, Y. S., Alissa, E., & Suryahartati, D. (2022). Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Perumahan Villa Bogor Indah 6 yang dikelola oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Bogor. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*.

⁷ Yenny, Y. S., Alissa, E., & Suryahartati, D. (2022). Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Perumahan Villa Bogor Indah 6 yang dikelola oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Bogor. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*.

⁸ Dwi, Anugrah. 2023. *Penyebab Terjadinya Krisis Ekonomi*. 19 Juni. <https://feb.umsu.ac.id/penyebab-terjadinya-krisis-ekonomi/>.

total. Keempat, Gejala di pasar keuangan, ketika harga aset melebihi nilai sebenarnya dan terjadi koreksi tajam.⁹

Hal ini dapat menyebabkan kerugian besar, ketidakpastian, dan ketidakstabilan perekonomian secara keseluruhan. Kelima, Krisis global, faktor eksternal seperti krisis ekonomi global atau guncangan ekonomi di negara lain juga dapat berdampak pada perekonomian suatu negara. Ketergantungan ekspor, perubahan arus modal atau krisis di negara mitra dagang dapat mengganggu perekonomian secara signifikan dan menimbulkan krisis. Keenam, Kegagalan kebijakan ekonomi, kebijakan ekonomi yang tidak tepat, termasuk kebijakan moneter, fiskal, atau struktural yang tidak efektif atau salah, dapat menyebabkan krisis ekonomi.¹⁰

Indonesia telah menjadi anggota G-20 sejak forum intergovernmental ini dibentuk di tahun 1999.¹¹ Bagi Indonesia kelompok eksklusif ini merupakan arena bergengsi tinggi dimana Indonesia dapat mencapai kepentingan-kepentingan nasionalnya. Namun Indonesia juga memahami posisi unik dan tanggung jawab vitalnya untuk mewakili negara-negara berkembang. Pertama, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang karena pertumbuhannya tercatat cukup penting di antara negara-negara berkembang lainnya dimasukkan dalam kategori *emerging economy*.¹² Sebagai *emerging economy* Indonesia mendapat hak istimewa untuk duduk dalam kelompok tersebut. Kedua, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat setelah China, Amerika Serikat dan India. Ketiga, mayoritas penduduk Indonesia beragama islam dan karenanya dapat memainkan peran potensial untuk menjembatani perbedaan-perbedaan di antara peradaban dunia.

Keanggotaan Indonesia dalam kelompok tersebut dapat membantu memperbaiki citra tentang perbedaan antara barat dan islam. Keempat, Indonesia merupakan negara demokrasi baru yang dalam proses konsolidasi. Keanggotaan Indonesia dapat memberikan inspirasi ke negara-negara lain untuk mempromosikan demokrasi dan mempertahankan ekonomi tinggi.¹³ Kelima, secara geografis Indonesia memiliki posisi yang signifikan. Indonesia merupakan satu-satunya anggota ASEAN yang menjadi anggota tetap G-20.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian pertama, yang penulis kaji adalah penelitian Wiwiek Rukmi Dwi Astuti dan Laode Muhamad Fathun pada jurnal *Intermestic Journal Of International Studies* yang berjudul *Diplomasi Ekonomi Indonesia di dalam Rezim Ekonomi G-20*

⁹ OCBC NISP. 2023. *Krisis Ekonomi, Penyebab, Dampak, dan Cara Mengatasinya*. 8 Februari. <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2023/02/08/krisis-ekonomi>.

¹⁰ Dwi, Anugrah. 2023. *Penyebab Terjadinya Krisis Ekonomi*. 19 Juni. <https://feb.umsu.acid/penyebab-terjadinya-krisis-ekonomi/>.

¹¹ Kemenkeu.go.id. (2022, Maret 22). Retrieved from Draft G-20: <https://www.kemenkeu.go.id/single-page/draft-G-20/#>.

¹² Urfah, S. (2017). *Pengaruh Keanggotaan Indonesia Dalam Forum G-20 Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia (Doctoral Dissertation, Perpustakaan)*.

¹³ Yulius P Hermawan, Wulani Sriyuliani, Getruida H Hardjowijono, Sylvie Tanaga. 2011. "Peran Indonesia dalam G-20." *Proyek Riset G-20* hal. 5.

Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo.¹⁴ Penelitian tersebut memiliki tujuan utama untuk melihat bentuk strategi diplomasi ekonomi Indonesia di dalam rezim ekonomi G-20 pada masa pemerintahan Joko Widodo.

Hasil dari penelitian tersebut bahwa Indonesia sebagai negara demokratis selalu mengambil posisi strategis untuk mewujudkan kepentingan ekonominya. Ekonomi menjadi domain penting dalam orientasi politik luar negeri Indonesia, sehingga ekonomi adalah upaya Indonesia terlibat dalam menstabilkan ekonomi nasional, regional dan internasional. Pola pemikiran ini sebagai bentuk rasionalitas negara modern yang mengkalkulasi setiap kontribusi melalui aksi.

Penelitian Kedua, yang penulis kaji adalah penelitian dari Arum Tri Utami pada Jurnal *Insignia* yang berjudul Analisis Efektivitas G-20 dalam Menangani Krisis Finansial Tahun 2008.¹⁵ Penelitian tersebut memiliki tujuan utama untuk mengetahui permasalahan yang sulit dan menantang untuk diselesaikan yang membawa pada pentingnya reformasi arsitektur tata kelola ekonomi global. G-20 muncul sebagai sebuah tata kelola ekonomi global yang signifikan.

Hasil dari penelitian bahwa forum G-20 adalah forum yang kepentingan negara diselaraskan dikembangkan dan lebih lanjut sebagai forum terutama setelah krisis Tahun anggaran 2008, yang awalnya dimulai Amerika Serikat khususnya berkembang pesat di Uni Eropa. Berbagai komitmen yang dikeluarkan oleh G-20 untuk menyelesaikan krisis tersebut. Keterlibatan yang dihasilkan opsional, tetapi dapat dikembalikan ke setiap negara anggota.

Penelitian Ketiga, yang penulis kaji adalah penelitian dari Agung Riyanto dan M.Fathoni pada Jurnal Hubungan Internasional Peradaban yang berjudul Analisis ANT (*Actor Network Theory*) Dalam Presidensi G-20 Arab Saudi Tahun 2020 Untuk Menghadapi Tantangan Perekonomian Global Di Masa Pandemi Covid-19.¹⁶ Penelitian tersebut mengarahkan dalam bentuk peran G-20 sebagai organisasi yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan yang dimana G-20 telah menjadikan lembaga dan rezim internasional yang mampu untuk mempertemukan banyak aktor, termasuk Arab Saudi negara yang paling banyak sumber minyak yang luas di dunia dengan ekonomi yang meningkat.

Hasil dari penelitian tersebut bahwa Arab Saudi sebagai salah satu negara berkembang senantiasa berusaha memosisikan diri dengan tepat dan juga strategis dalam mewujudkan kepentingan perekonomiannya. Pola pemikiran tersebut memang bentuk rasionalitas sebuah bangsa atau negara modern yang memperhitungkan setiap kontribusi dalam bentuk aksi. Aksi Arab Saudi dibuktikan dengan keterlibatannya bergabung dengan G-20 sebagai upaya kontribusi dalam tatanan ekonomi dunia.

¹⁴ Astuti, W. R. D., & Fathun, L. M. (2020). Diplomasi Ekonomi Indonesia di dalam Rezim Ekonomi G-20 pada Masa Pemerintahan Joko Widodo. *Intermestic: Journal of International Studies*.

¹⁵ Utami, A. T. (2016). Analisis Efektivitas G-20 Dalam Menangani Krisis Finansial Tahun 2008. *Insignia: Journal of International Relations*.

¹⁶ Riyanto, A., & Fathoni, M. (2022). Analisis ANT (*Actor Network Theory*) Dalam Presidensi G-20 Arab Saudi Tahun 2020 Untuk Menghadapi Tantangan Perekonomian Global Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Hubungan Internasional Peradaban*.

Penelitian Keempat, yang penulis kaji adalah penelitian Ni Putu Diah Mustika Yanthi, dkk pada Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Sosial dengan judul Peluang dan Tantangan SDM Bali serta Strategi dalam Menyambut Kegiatan Presidensi G-20. Penelitian tersebut memaparkan dalam bentuk Peluang yang muncul dari tindakan Presidensi G-20 dapat melakukan sesuatu perputaran keuangan baik itu secara mikro maupun makro yang lebih signifikan dari sebelumnya.¹⁷

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Presidensi G-20 yang bertaraf internasional Sumber Daya Manusia di Bali memiliki kesempatan untuk menunjukkan hal kepada dunia internasional tentang sumber daya yang ada di Bali termasuk peluang dan acara pariwisata yang mana bisa menjadi media promosi Bali dimata dunia dalam sektor pariwisata. Strategi yang sangat diperlukan dan berguna untuk memanfaatkan peluang dan menanggapi tantangan ialah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membuka lebih banyak sektor ekonomi untuk investasi, infrastruktur ekonomi dan industri serta peningkatan pendidikan nasional yang harus diperhatikan menarik lebih banyak investasi asing.

Penelitian Kelima, yang penulis kaji adalah penelitian dari Sonideritus Bandung pada Forum Filsafat dan Teologi yang berjudul *Social Interest* dan Relevansinya Terhadap Keterlibatan Indonesia dalam G-20. Penelitian tersebut menjelaskan G-20 merupakan forum kerjasama dengan 19 negara besar dan Uni Eropa memecahkan masalah penting seperti masalah iklim, perdagangan multilateral, dan krisis ekonomi global yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Partisipasi Indonesia forum G-20 mengandalkan komitmen dan kontribusi Indonesia terhadap upaya tersebut untuk mempromosikan kesejahteraan bersama.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa manusia tidak dapat melangkah seorang diri. Manusia mesti memiliki keinginan untuk mengambil bagian, berbagi dan bekerja sama dengan yang lainnya. Proses membuka diri, menjalin relasi, dan mengambil bagian dalam keanggotaan atau komunitas dalam masyarakat sosial merupakan langkah awal bagi manusia untuk mencapai kesejahteraan bersama.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang merupakan salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu objek. Sehingga menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif, dimana pada penelitian ini basisnya adalah interpretasi atas sebuah peristiwa secara naratif bukan dengan menggunakan angka-angka maupun persentase.¹⁸ Sehingga memperoleh data yang bersumber dari narasi, tindakan, sumber data tertulis, foto serta data tambahan lain seperti buku, jurnal dan dokumen-dokumen lainnya yang akan menjadi bahan keterangan dari objek yang diteliti.¹⁹

¹⁷ Yanthi, N. P. D. M., Yudhaningsih, N. M., & Pering, I. M. A. A. (2022). Peluang Dan Tantangan SDM Bali Serta Strategi Dalam Menyambut Kegiatan Presidensi G-20. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Sosial (EMBOSS)*.

¹⁸ Umar S. Bakry, *Pedoman Penulisan Skripsi Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 12.

¹⁹ Azwardi, *Metode Penelitian* (Banda: Syiah Kuala University Press, 2018), hlm. 103.

KERANGKA PEMIKIRAN

KONSEP DIPLOMASI *MIDDLE POWER*

konsep diplomasi *middle power* yang merupakan upaya dari negara-negara untuk menekankan kebijakan luar negerinya yang utama. masalah yang terkait dengan prioritas kebijakan luar negeri yang spesifik dari suatu negara. Berbagai jenis atau karakteristik kekuatan dari negara *middle power* telah menunjukkan eksistensinya dalam membangun citra dan kepemimpinan regional.²⁰ Diplomasi *middle power* perlu memprioritaskan identitas kebijakan luar negeri sebagai fokus terkait isu-isu tertentu. Selain itu, diplomasi *middle power* setidaknya memerlukan forum untuk mempertemukan kekuatan strategis untuk mempengaruhi tindakan global. Diplomasi *middle power* tidak hanya sebatas kapasitas regional atau transregional bahkan dalam diplomasi multilateral.²¹

Diplomasi *middle power* adalah sebuah negara yang tidak besar atau kecil dalam hal kekuatan, kapasitas dan pengaruh internasional, dan menunjukkan kecenderungan untuk mendorong kohesi dan stabilitas dalam sistem global. *Middle power* juga dianggap mampu mempertahankan diri dalam kemandirian terhadap urusan dalam negeri sendiri maupun luar negeri, dan tetap bersahabat atau sosial dengan tetangganya.²² *Middle power* mempunyai kekuatan ekonomi yang cukup dan politik di lingkungan strategis kewasannya, dimana negara *middle power* berupaya untuk membangun kepemimpinan regional melalui kegiatan diplomasi multilateral dan kerjasama.

Diplomasi *middle power* pun menetapkan posisi strategis melalui kebijakan luar negeri (*foreign policy*) secara independen tanpa mengurangi pengaruh negara kekuatan besar (*great power*) dalam melaksanakan kebijakan luar negeri. Pengaruh ini adalah memungkinkan diplomasi *middle power* untuk mengakumulasi kekuatan strategis dengan negara berkembang atau negara *middle power* lainnya untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri yang mempunyai cakupan nasional atau strategis negara-negara besar (*great power*) yang mempengaruhi tindakan global.²³ Sehingga, negara *middle power* mempunyai pengaruh dalam implementasi ekonomi dan politik terkait kebijakan luar negeri dan praktek diplomasi dengan tujuan tertentu.

Nicholson berpandangan bahwa ada empat hal penting terkait diplomasi ialah; Pertama, kebijakan luar negeri. Kedua, negosiasi. Ketiga, mekanisme. Keempat, melakukan negosiasi suatu cabang dalam misi diplomasi.²⁴ Berdasarkan diplomasi *middle power* ini juga membawa arah kebijakan luar negeri seperti Indonesia tidak lepas dari tatanan global. Kebijakan Indonesia yang tampaknya berfokus pada

²⁰ Ahmad Ziyad, M. Roehman Zainur Riedho. 2020. "Konsep Diplomasi Middle Power dalam Multilateralism Era Baru." *Jurnal Hubungan Internasional*.

²¹ Triwibowo, A., & Martha, J. (2021). Diplomasi middle-power Indonesia di masa pandemi. *Indonesian Perspective*.

²² Irewati, A., & Kartini, I. (2020). *Potret politik luar negeri Indonesia di era reformasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

²³ Denish Pudyal, 2019. *Middle Power Diplomacy Analysis*. Tribhuvan University. p. 1

²⁴ S.L Roy. 1995. *Diplomasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

domestik telah mendorong negara ini untuk mengadopsi diplomasi *middle power* untuk menyeimbangkan pembangunan dalam negeri dan isu-isu internasional.²⁵ Indonesia juga memainkan peran diplomasi sebagai *bridge builder*, katalisator dan *good international citizenship*. Segala upaya yang ditunjukkan Indonesia berkaitan dengan karakter diplomasi *middle power* sebagai *good international citizenship*, sehingga negara dapat menjaga reputasi komitmen Indonesia seperti pembangunan berkelanjutan, isu perubahan iklim dan lain-lain.

KONSEP KEPENTINGAN NASIONAL

Konsep kepentingan nasional merupakan salah satu konsep utama yang sering dijadikan instrumen untuk menganalisis banyak fenomena dalam hubungan internasional.²⁶ Semua negara selalu terlibat dalam upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan nasional dan selalu bekerja sama untuk memenuhi kepentingannya masing-masing.²⁷

Mewujudkan kepentingan nasional negara akan beroperasi secara stabil secara politik, ekonomi, sosial, atau pertahanan, keamanan, atau kepentingan nasional lainnya tercapai maka negara akan tetap survive.²⁸ Kepentingan nasional menjadi tujuan yang mendasar dan faktor paling menentukan yang mempersatukan pengambil keputusan internal dalam membangun kebijakan luar negeri.

Daniel S. Papp berpandangan bahwa kepentingan nasional mempunyai banyak aspek seperti, ekonomi, ideologi, kekuatan dan keamanan militer, etika dan legalitas. Hal ini faktor ekonomi dari setiap kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara selalu berusaha untuk meningkatkan perekonomian suatu negara dianggap sebagai kepentingan nasional. Sebuah kepentingan dalam aspek perekonomian nasional yakni meningkatkan keseimbangan kerja sama perdagangan suatu negara dalam penguatan bidang industri, dan sebagainya.²⁹ Kepentingan nasional diidentifikasi sebagai tujuan nasional seperti kepentingan pembangunan ekonomi, peningkatan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan kepentingan untuk mengundang penanaman modal asing dalam mempercepat laju industrialisasi.³⁰

Kepentingan nasional sering digunakan kriteria atau kriteria utama bagi pengambil keputusan (*decision makers*) masing-masing negara sebelum formulasi dan identifikasi sikap atau tindakan. Bahkan setiap langkah kebijakan luar negeri (*foreign policy*) harus didasarkan pada kepentingan arah nasional dan mencapai serta melindungi apa yang diklasifikasikan atau diidentifikasi dalam kepentingan nasional

²⁵ Kusumastuti, R. D. (2023). *Peran Diplomasi Middle power Indonesia dalam Perubahan Iklim Global sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan di Era Kepemimpinan Joko Widodo* (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro).

²⁶ Eufronius Suwarman, eds, "Rivalitas Geopolitik Amerika Serikat-Tiongkok di Myanmar," *Journal Asia Pacific Studies*, Vol. 2, No. 2 (2018), hlm.182.

²⁷ Robinson, Thomas. (1969). "National Interest" dalam James N. Rosenau, *International Politics and Foreign Policy: A Reader on Research and Theory*. New York: The Free Press, hal.182.

²⁸ Anak Agung Banyu Perwira dan DR. Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Hubungan Internasional*, PT. Remaja Rosdakarya Bandung 2005. Hal. 47.

²⁹ Daniel S, Papp. 1988. *Contemporary International Relations*. hal. 29.

³⁰ Daniel S, Papp. 1988. *Contemporary International Relations*. hal. 29.

itu sendiri.³¹ Misalnya Indonesia yang sebagai negara berkembang pesat dengan perekonomian yang beragam akan kaya sumber daya dimana mempunyai kepentingan nasional yang signifikan dalam perekonomian global seperti mendorong pertumbuhan ekonomi yang merupakan prioritas utama bagi Indonesia. Hal ini pertumbuhan ekonomi yang kuat menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan menyediakan sumber daya untuk investasi di bidang infrastruktur dan sektor-sektor penting lainnya. Pembangunan infrastruktur yang baik juga merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Investasi di bidang transportasi, energi dan telekomunikasi yang akan meningkatkan konektivitas dan meningkatkan aktivitas bisnis.³²

Ada dua aspek yang dapat menjelaskan kepentingan nasional. Pertama, kepentingan nasional dapat dipahami sebagai kesejahteraan umum seluruh masyarakat. Definisi kepentingan nasional yang diusulkan menolak pandangan bahwa masyarakat hanyalah sebuah kerangka kerja untuk interaksi terkadang kooperatif, sering kali kompetitif dari kelompok-kelompok kepentingan kecil yang bermodal besar. Sebaliknya, ia memandang masyarakat nasional sebagai sebuah komunitas, dengan standar moralitas politik yang sama, dimana hubungan saling menghormati dan menghargai menyatukan para anggotanya. Kedua, kepentingan nasional mengacu pada prinsip regulasi umum diplomasi yang menyatakan bahwa kepentingan bersama masyarakat, dalam hubungannya dengan unit nasional lainnya yang merupakan tujuan akhir dari tindakan diplomasi.³³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Pembentukan G-20 (*Group of Twenty*)

G-20 (*Group of Twenty*) merupakan forum internasional yang beranggotakan 19 negara dan Uni Eropa. Didirikan pada tahun 1999 untuk mempertemukan negara-negara maju dan berkembang untuk membahas stabilitas keuangan internasional dan meningkatkan kerja sama ekonomi. Selama bertahun-tahun, G-20 telah berkembang menjadi platform penting untuk mengatasi tantangan ekonomi global dan membentuk kebijakan internasional.³⁴

Pembentukan G-20 dapat ditelusuri kembali setelah krisis keuangan Asia pada tahun 1997. Menyadari adanya kebutuhan untuk meningkatkan koordinasi antara negara-negara utama, menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari 19 negara dan perwakilan dari berbagai organisasi internasional.³⁵ Bersidang di Berlin pada

³¹ Hyndman, James E. 1970/1971. *National Interest and The New Look*. International Journal, Vol. 26, No. 1: pp. 5-18.

³² Bainus, A., & Rachman, J. B. (2018). Kepentingan Nasional dalam Hubungan Internasional. *Intermestic: Journal of International Studies*.

³³ Clinton, W. David. 1986. *The National Interest: Normative Foundations*. The Review of Politics, Vol. 48, No. 4: pp. 495-519.

³⁴ Indonesia, CNN. 2022. *Mengenal G20: Sejarah, Tujuan, dan Perannya Mengenal G20: Sejarah, Tujuan, dan Perannya*. Januari. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220110161907-537-744798/mengenal-g20-sejarah-tujuan-dan-perannya>.

³⁵ Indonesia, CNN. 2022. *Mengenal G20: Sejarah, Tujuan, dan Perannya Mengenal G20: Sejarah, Tujuan, dan Perannya*. Januari. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220110161907-537-744798/mengenal-g20-sejarah-tujuan-dan-perannya>.

bulan Desember 1999 untuk membentuk apa yang kemudian dikenal sebagai G-20. Seperti yang tercantum dalam *Group of Twenty : A History*, pembentukan forum ini mencerminkan pengakuan anggota G-7 atas peran negara-negara berkembang dalam berkontribusi terhadap tata kelola perekonomian global saat ini.³⁶

“The inclusion of developing countries and other important countries in the NAB is a deliberate initiative of the G-27, especially the United States, to encourage financially capable countries to assume significantly greater responsibility for the operational efficiency of the system of international finance and international economics. financial expansion. cooperation outside the G7 or G10 group of industrialized countries”.

Terdapat sejarah kelam dalam perekonomian global ketika krisis moneter terjadi pada tahun 1997 hingga 1999. Krisis moneter yang terjadi memunculkan gerakan yang dibentuk oleh para menteri keuangan dari beberapa negara besar di dunia sehingga dikenal sebagai G-7. Forum ini didirikan untuk mengatasi kekhawatiran yang mempengaruhi komunitas global akibat krisis moneter yang sedang terjadi pada saat itu. Tepat pada tahun 1997, krisis moneter merambah ke seluruh benua Asia, khususnya Thailand, dimana mata uang Baht mengalami depresiasi.³⁷ Hal ini dikarenakan mata uang asing memiliki jumlah nominal yang sangat minim sehingga Thailand tidak mampu mempertahankan nilai mata uang Baht terhadap Dollar Amerika Serikat. Hal tersebut kemudian membuat Thailand membopong derita berupa utang yang dapat dibilang sangat besar, sehingga Thailand menghadapi krisis akibat turunnya nilai mata uang Baht yang drastis.

Sejak saat itu, krisis moneter telah menjadi wabah yang meluas. Negara yang paling terkena dampak krisis moneter tahun 1997 adalah Indonesia, Thailand dan Korea Selatan. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa negara lain di Asia juga merasakan dampaknya meski dengan tingkat yang berbeda. Pecahnya krisis moneter menyebar dengan sangat cepat ke seluruh Asia dan mempengaruhi Rusia hingga Amerika Serikat setelah runtuhnya LTCM (*Long Term Capital Management*) dan akhirnya mempengaruhi Brazil pada tahun 1998. Meskipun negara-negara di luar benua Asia belum terlalu merasakan dampaknya. Namun dengan runtuhnya perekonomian benua Asia, perekonomian Eropa dan Amerika Serikat pun turut terpuruk seiring dengan menyebarnya wabah ini ke seluruh lapisan dunia.³⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut G-7 dibentuk sebagai forum diskusi yang dapat menjadi harapan baru atas solusi terhadap isu-isu yang ada. Forum tersebut dihadiri oleh tujuh menteri keuangan dari negara-negara dengan perekonomian terkuat di dunia. Sehingga menyatakan bahwa partisipasi negara lain diperlukan untuk mencapai hasil maksimal dari pertemuan tersebut.³⁹ Ketika Menteri Keuangan Paul

³⁶ Hermawan, Y. P. (2012). Legitimasi, efektivitas dan akuntabilitas G-20 sebagai klub eksklusif dalam pembentukan tata kelola ekonomi global. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*.

³⁷ Putri, A. S. (2020). G20: Mediator untuk Kemajuan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*. Hal. 4.

³⁸ Putri, A. S. (2020). G20: Mediator untuk Kemajuan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*. Hal. 4.

³⁹ Putri, A. S. (2020). G20: Mediator untuk Kemajuan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*. Hal. 5.

Martin dari Kanada dan Lawrence Summer dari Amerika Serikat menyadari bahwa mereka tidak hanya dapat menahan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat tetapi juga harus melibatkan negara-negara dari berbagai benua agar dapat mengadakan diskusi yang lebih dalam dapat mempengaruhi seluruh wilayah yang mengalami kesulitan ekonomi tanpa terkecuali.

Transisi ini kemudian menjadi penting terkait persepsi dimensi global yang semakin meluas. Kesadaran akan aspek global ini juga memegang peranan penting bagi negara-negara berkembang, karena refleksi ini memungkinkan negara-negara berkembang untuk berpartisipasi bersama dalam forum yang besar. Kesadaran akan dimensi global inilah yang kemudian menjadi landasan berkembangnya G-7 menjadi G-20.⁴⁰ Ironisnya sebuah forum sama pentingnya dengan G-20 diciptakan dengan dorong oleh krisis. Seperti KTT yang terjadi pada tahun 2008 akibat krisis keuangan yang memaksa G-20 mengadakan pertemuan KTT setidaknya enam bulan sekali.

Peran Indonesia dalam Memulihkan Krisis Ekonomi Global

Indonesia berupaya memanfaatkan forum kerja sama internasional G-20 semaksimal mungkin untuk meningkatkan pembangunan ekonomi global, pulih dari pandemi COVID-19 dan menjalin hubungan seluas-luasnya, hal ini tentunya akan membawa manfaat bagi Indonesia jika agenda-agenda tersebut bekerja dengan baik.⁴¹ Selain itu, Indonesia akan dipandang sebagai negara berkembang yang mampu menyelesaikan permasalahan global melalui gagasan-gagasan yang diusungnya dan memberikan citra positif negara di kancah internasional.

Peran Indonesia dalam forum kerja sama G-20 cukup besar. Selain itu Indonesia terlibat dalam perencanaan program kerja kelompok G-20.⁴² Terdapat beragam upaya Indonesia sebagai contoh kecil yaitu, Indonesia mempunyai kesempatan untuk mengikuti pelatihan arsitektur ekonomi global yang ditujukan untuk mendukung perekonomian untuk bertahan dari krisis keuangan di masa mendatang. Indonesia pun memainkan peran penting dalam meluncurkan program-program kerja di forum G-20 adalah:

1. GESF (*Global Expenditure Support Fund*)

GESF (*Global Expenditure Support Fund*) merupakan sebuah program kerja G-20 yang diusulkan oleh Indonesia pada tahun 2008. Latar belakang Indonesia menginisiasi program kerja ini adalah Krisis Global 2008 yang terjadi pada Amerika Serikat yang membuat tidak tertatanya pinjaman kredit internasional dan pasar ekuitas yang membuat terjadinya krisis likuiditas. Hal ini sangat berdampak pada negara-negara berkembang yang

⁴⁰ Putri, A. S. (2020). G20: Mediator untuk Kemajuan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*. Hal. 5.

⁴¹ Warhidatun Maratus Solechah, Sugito. 2023. "Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Sebagai Kepentingan Nasional Indonesia Dalam Presidensi G20." *Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*. Hal. 8.

⁴² Larasasati, C., & Natasya, E. D. (2017). Peran Indonesia di G-20: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Hubungan Internasional*.

terdampak oleh krisis tersebut.⁴³ Hal ini menjadi tidak dapat meneruskan pembangunan negaranya akibat terbatasnya pinjaman kredit tersebut. Maka dari masalah ini harus ada solusi untuk menanggulangi keterbatasan anggaran negara yang harus diperluas lagi aksesnya meskipun di dalam keadaan dimana kapital masih terbatas. Indonesia melihat GESF sebagai upaya dukungan terhadap negara berkembang untuk mengamankan anggaran nasionalnya di situasi krisis likuiditas. GESF tersebut, Indonesia mengutamakan negara untuk membantu pemulihan dari dampak krisis. Selain itu GESF adalah dana yang tersedia untuk negara berkembang di mana dana tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur dan keuangan untuk mencapai program Millenium Development Goals (MDGs).

Berdasarkan proposalnya, Indonesia menyarankan bahwa dana disisihkan untuk negara berkembang yang bukan anggota G-20. Ada beberapa alasan mengapa dana tersebut diperlukan. Pertama, mekanisme diusulkan untuk mengantisipasi dampak jangka panjang dari krisis global di negara-negara berkembang. Indonesia berpendapat bahwa perlu adanya mekanisme yang dapat mendukung negara-negara berkembang yang miskin, karena sistem ekonomi global masih belum berpihak pada negara berkembang. Kedua, melalui mekanisme GESF diharapkan negara-negara berkembang tidak mengalami kesulitan dalam proses pembangunan infrastruktur dalam mencapai tujuan MDGs. Ketiga, mengamankan aliran keuangan baru ke negara-negara berkembang melalui GESF juga akan memastikan percepatan pemulihan krisis global.⁴⁴

Populasi dunia dan tingkat pertumbuhan ekonomi sebenarnya terkonsentrasi di negara-negara berkembang, situasi yang stabil di negara-negara berkembang akan memfasilitasi proses pemulihan situasi setelah krisis dunia. Terakhir, melalui mekanisme aliran keuangan baru juga, diharapkan negara-negara di luar G-20 yang umumnya merupakan negara berkembang yang lebih miskin juga akan merasakan dampak positif dari adanya forum ekonomi ini.⁴⁵

Pada Januari 2022 GESF juga fokus umumnya pada pendidikan dan keterampilan global. Namun terkait keikutsertaan Indonesia di G20, negara ini terlibat aktif dalam diskusi kebijakan ekonomi dan isu-isu global lainnya dengan mitra G20. Seperti pembangunan berkelanjutan dimana pemerintah Indonesia berpartisipasi dalam diskusi mengenai implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Krisis kesehatan global terkait pandemi COVID-19, Indonesia juga membahas respons bersama terhadap krisis kesehatan global, termasuk distribusi vaksin dan tindakan lainnya.

⁴³ Imannulloh, E. R., & Rijal, N. K. (2022). Upaya Indonesia dalam Mendorong Prioritisasi Perekonomian Negara Berkembang melalui G20: Perspektif Hyper-Globalist. *Indonesian Perspective*. Hal. 11.

⁴⁴ Hermawan, Y. P. (2011). Peran Indonesia dalam G-20. *Proyek Riset G-20*. Hal. 49.

⁴⁵ Hermawan, Y. P. (2011). Peran Indonesia dalam G-20. *Proyek Riset G-20*. Hal. 49.

Indonesia pun berpartisipasi dalam diskusi mengenai pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesetaraan, yang merupakan salah satu prioritas G20.⁴⁶

2. WG 4 (*Working Group 4*)

Working Group 4 ini membahas reformasi tentang peran MDBs dalam menyediakan likuiditas bagi negara-negara berkembang (*Emerging Markets*) dengan prioritas di saat masa krisis. Kuatnya dukungan Indonesia terkait dengan pendapat presiden Indonesia pada saat itu Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa MDBs adalah elemen desain dukungan anggaran untuk negara berkembang yang digunakan untuk mendukung regulasi *counter-cyclical*. Perancangan ini dapat mencegah dampak krisis yang besar dan juga memantau kelangsungan berjalannya program dan mengusulkan agar MDBs membuat dan meningkatkan efektivitas instrumen pendukung anggaran bagi Emerging Markets yang digunakan untuk mendukung kebijakan *counter-cyclical* guna memitigasi dampak krisis dan kelangsungan program pencapaian dari program MDGs.⁴⁷

Pembangunan Milenium sendiri merupakan suatu deklarasi pembangunan global yang diselenggarakan pada Konferensi Tingkat Tinggi Milenium. Deklarasi ini merupakan hasil persetujuan bersama antara 189 negara-negara berkembang dan negara maju dari anggota PBB yang dilaksanakan di New York pada bulan September tahun 2000. Seluruh negara yang hadir dalam konferensi tersebut telah berjanji untuk menghadirkan MDGs menjadi bagian dari pembangunan nasional masing-masing negara yang berisi tentang pembangunan, hak asasi manusia, keamanan, dan perdamaian.⁴⁸

Pada pertemuan WG 4 pada 20 Januari 2022 juga, dimana *cho-Chair* dan Presidensi menerima masukan dari negara-negara anggota dan organisasi internasional mengenai agenda infrastruktur G-20 dan hasil yang ingin dicapai di tahun mendatang. Pertama, meningkatkan investasi infrastruktur berkelanjutan dengan partisipasi sektor swasta, Infrastruktur berkelanjutan adalah pembangunan yang menitikberatkan pada kelestarian infrastruktur secara sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan mempertimbangkan segala dampak yang ditimbulkannya.⁴⁹

⁴⁶ Indonesia, CNN. 2022. *Mengenal G-20: Sejarah, Tujuan, dan Perannya Mengenal G20: Sejarah, Tujuan, dan Perannya*. 1 Januari. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220110161907-537-744798/mengenal-g20-sejarah-tujuan-dan-perannya>.

⁴⁷ Urfah, S. (2017). *Pengaruh Keanggotaan Indonesia Dalam Forum G-20 Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Perpustakaan).

⁴⁸ Wahyuningsih, W. (2018). Millenium Development Goals (Mdgs) dan Sustainable Development Goals (Sdgs) dalam Kesejahteraan Sosial. *BISMA: Jurnal Bisnis dan Manajemen*.

⁴⁹ Kementerian Keuangan, (2020). *4 Agenda Infrastructure Working Group G-20*. 17 Maret. <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1144-1366/umum/kajian-opini-publik/4-agenda-utama-infrastruktur-working-group-iwg-g20>.

Kenyataannya infrastruktur berkelanjutan memerlukan penyelarasan proses bisnis dari hulu hingga hilir.⁵⁰ Salah satu upaya pemerintah dalam menyediakan infrastruktur berkelanjutan adalah dengan menyusun rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) 20 tahun dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) 5 tahun. Untuk memenuhi definisi infrastruktur berkelanjutan, khususnya terkait aspek lingkungan dan sosial, pemerintah juga harus memastikan bahwa pembangunan infrastruktur memenuhi kriteria lingkungan, sosial, dan tata kelola (*Environmental, Social, Governance*).

Hal ini sejalan dengan perubahan iklim yang menjadi salah satu tantangan utama implementasi G-20. Pencapaian peran sektor swasta dalam infrastruktur berkelanjutan dapat dicapai dengan memperkuat kebijakan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), khususnya di Indonesia.⁵¹ Selain itu, fokus utama KPBU adalah pada ketersediaan layanan, yaitu layanan yang diberikan sejalan dengan prinsip infrastruktur berkelanjutan. Untuk memperkuat peran sektor swasta dalam menyediakan infrastruktur yang berkelanjutan, negara-negara anggota menantikan kemampuan Presidensi untuk mengembangkan dokumen kerangka kerja yang berisi rekomendasi dan langkah-langkah konkrit yang ringkas dan mudah diakses oleh negara-negara anggota. Kedua, memperkuat integrasi sosial dan menghilangkan kesenjangan regional, membangun kerangka pembangunan daerah memerlukan proses pembangunan yang dapat mengidentifikasi berbagai faktor untuk meningkatkan kapasitas daerah.⁵²

Perubahan kapasitas produktif mudah diukur dengan menggunakan pendapatan perkapita (PDB), namun ukuran ini bukanlah satu-satunya ukuran. Peningkatan kesejahteraan masyarakat harus menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan daerah. Hal ini bukan hanya tentang seberapa besar nilai tambah yang dihasilkan dari proses produksi. Peningkatan kesejahteraan masyarakat antara lain dapat dilihat dari menurunnya angka pengangguran, jumlah penduduk miskin, dan tanda-tanda membaiknya kualitas konsumsi masyarakat, baik konsumsi pangan maupun pendidikan dan kesehatan.⁵³

⁵⁰ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, (2022). *Penetapan Keanggotaan Pokja, Jadwal Pertemuan dan Agenda Prioritas, Mendukung Kesuksesan Rangkaian Presidensi G20*. 18 Februari. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4114/determination-of-working-group-membership-meeting-schedule-and-priority-agenda-supporting-the-success-of-the-g20-presidency-series>.

⁵¹ Kementerian Keuangan, (2020). *4 Agenda Infrastructure Working Group G-20*. 17 Maret. <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1144-1366/umum/kajian-opini-publik/4-agenda-utama-infrastructure-working-group-iwg-g20>.

⁵² CNBC Indonesia, (2022). *Putaran final digital Working Group*. 19 September. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220919131353-8-373206/putaran-final-digital-economy-working-group>.

⁵³ CNBC Indonesia, (2022). *Putaran final digital Working Group*. 19 September. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220919131353-8-373206/putaran-final-digital-economy-working-group>.

3. GICA (*Global Infrastruktur Connectivity Alliance*)

Peran Indonesia lainnya adalah membangun GICA (*Global Infrastruktur Connectivity Alliance*) mendukung konektivitas melalui kolaborasi dan berbagi pengetahuan.⁵⁴ Mengundang negara-negara G-20 yang lain fokus untuk mendukung ikatan melalui kolaborasi dan pertukaran pandangan dalam mendukung proses pembiayaan pendanaan infrastruktur negara-negara. Konektivitas infrastruktur global sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi dan integrasi regional. Aliansi GICA (*Global Infrastruktur Connectivity Alliance*) bertujuan untuk mendorong kerja sama dan berbagi pengetahuan antar negara dan mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan inklusif di seluruh dunia. Mendirikan GICA, Indonesia menekankan lokasi geografisnya yang strategis, partisipasi aktif dalam inisiatif GICA, dan pengalaman dengan proyek infrastruktur yang ada.

Partisipasi aktif Indonesia dalam GICA menunjukkan komitmen Indonesia dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan inklusif di tingkat global. Sehingga Indonesia bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar negara dan mendorong pembangunan ekonomi dengan berpartisipasi dalam berbagai inisiatif GICA seperti Belt and Road Initiative dan ASEAN *Connectivity Master Plan*. Berdasarkan inisiatif GICA, Indonesia secara aktif menjalin kerja sama juga dengan negara lain melalui proyek-proyek seperti Inisiatif Sabuk dan Jalan (*Belt and Road Initiative*), yang berfokus pada penguatan konektivitas infrastruktur antara Asia dan Eropa. Memprioritaskan infrastruktur berkelanjutan Indonesia juga sebagai pendukung keberlanjutan dalam menekankan proyek infrastruktur ramah lingkungan yang mendorong seperti penggunaan energi terbaru, sistem transportasi ramah lingkungan, dan perlindungan lingkungan sekaligus memastikan inklusi masyarakat, fokus pada proyek-proyek struktural.⁵⁵

Keberhasilan Indonesia dalam pembangunan infrastruktur dapat menjadi model berharga bagi negara-negara anggota yang tergabung dalam GICA. Negara tersebut telah melaksanakan proyek-proyek besar seperti Jalan Tol Trans-Jawa dan MRT Jakarta yang menunjukkan kemampuannya dalam mengatasi tantangan kompleks terkait pembebasan lahan, pembiayaan dan implementasi proyek. Proyek infrastruktur yang berhasil Indonesia telah melaksanakan proyek ambisius seperti Jalan Tol Trans-Jawa, jalan raya sepanjang 1.000 km yang menghubungkan kota-kota besar di pulau Jawa yang dibangun pada tahun 2015 hingga 2019

⁵⁴ Pemkot Surakarta, (2022). *Peran Aktif Indonesia Dalam G-20*. 21 Maret. <https://surakarta.go.id/?p=23682>.

⁵⁵ Lovina, H. R., Jiajia, G., & Chen, H. (2017). Review of "The Chinese Belt and Road Initiative": Indonesia-China cooperation and future opportunities for Indonesia's port cities development. *Journal of Regional and City Planning*.

dengan dana APBN atau skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp. 40 Triliun.⁵⁶

Berdasarkan tahun 2020 hingga 2023 juga target pembangunan jalan tol sepanjang 1.367 km dapat terwujud, dimana dari tahun 2020 hingga Mei 2023, telah selesai sepanjang 535,5 km dan akan menyusul 309,78 km jalan tol baru yang tersebar di 13 ruas hingga akhir tahun 2023. Pembangunan jalan tol yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas multimoda bagi pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing. Sehingga penguatan UMKM lokal juga menjadi bagian dalam pengembangan jalan tol dimana di setiap rest area tidak hanya diisi oleh merek besar tetapi juga produk-produk UMKM lokal.⁵⁷

4. IDEA Hub (*Inclusive Digital Economy Accelerator*)

Peran terakhir Indonesia yaitu menggagas inisiatif IDEA Hub (*Inclusive Digital Economy Accelerator*).⁵⁸ IDEA Hub adalah platform berbagai variasi berbisnis dalam ekonomi digital yang akan menyusul kemudian berguna untuk UMKM, pengusaha dan kelompok sosial kelas bawah. Selain itu IDEA Hub juga menjadi forum pertemuan para unicorn negara-negara G-20 untuk bertukar pandangan. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia berada di urutan 5 negara paling atas dengan startup terbanyak di dunia dan berada di 10 daftar negara dengan startup yang telah menjadi unicorn terbanyak di dunia.

Paparan yang disampaikan oleh Lis Sutjiati, Staf Khusus PMO dan Menteri Komunikasi dan Informatika Ekonomi Digital. Acara ini dilanjutkan dengan presentasi oleh Sharly Rungkat dari PwC mengenai prototype IDEA Hub, yang berjalan sesuai rencana. Menurut Lis Sutjiati bahwa para duta besar sangat mendukung gagasan Indonesia dan memberikan saran bagaimana menjadikan hub yang dibangun lebih efektif dan maksimal. Menteri Indonesia juga berpartisipasi dan mengundang duta besar untuk membahas strategi guna memastikan adopsi inisiatif tersebut pada pertemuan G-20.⁵⁹

Hal ini Duta Besar, atau Duta Besar yang sedang tidak berada di Indonesia, akan diwakili oleh charge d'affairs, deputy chief of mission, atau pejabat yang setara dengan Duta Besar. Delegasi berasal dari Australia,

⁵⁶ Kementerian PUPR, (2017). *Pendanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol dilakukan Melalui BLU LMAN*. 5 April. <https://pu.go.id/berita/pendanaan-pengadaan-tanah-jalan-tol-dilakukan-melalui-blu-lman>.

⁵⁷ Kementerian PUPR. 2023. *Kementerian PUPR targetkan 13 Ruas Jalan Tol baru sepanjang 309,78 km beroperasi hingga akhir 2023*. 26 Mei. <https://pu.go.id/berita/kementerian-pupr-targetkan-13-ruas-jalan-tol-baru-sepanjang-30978-km-beroperasi-hingga-akhir-2023>.

⁵⁸ Kompasiana, (2023). *Peran Indonesia dalam ekonomi global, tantangan dan dampaknya terhadap perekonomian dunia*. 13 April. <https://www.kompasiana.com/arum00594/64378e92a7e0fa7dbc217262/peran-indonesia-dalam-ekonomi-global-tantangan-dan-dampaknya-terhadap-perekonomian-dunia>.

⁵⁹ Menteri Kominfo, (2018). *Inisiatif Indonesia tentang G20 Inclusion Digital Economy Accelerator (G20 IDEA Hub)*. 24 July. https://www.kominfo.go.id/content/detail/13629/cara-rudiantara-muluskan-usulan-g20-idea-hub/0/sorotan_media.

Korea Selatan, Perancis, Italia, Rusia, Tiongkok, Amerika Serikat, Argentina, Meksiko, Afrika Selatan, Inggris, Jepang, India, dan Jerman. IDEA Hub dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan dukungan Konsultan Internasional *PricewaterhouseCoopers* (PwC) sebagai mitra pengetahuan.⁶⁰ Hal ini dirancang sebagai upaya mengatasi kesenjangan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Permasalahan ketimpangan ekonomi dan sosial merupakan permasalahan umum di negara-negara G-20 dan dunia pada umumnya.

IDEA Hub merupakan sistem portal yang berisi berbagai informasi dan pengetahuan tentang berbagai model bisnis inovatif ekonomi digital. Platform ini diharapkan menjadi pendorong adopsi dan penerapan model bisnis digital untuk ekonomi berbagi (*sharing economy*), digitalisasi tenaga kerja (*workforce digitalization*), dan inklusi keuangan (*financial inclusion*). Melalui penerapan model bisnis oleh instansi pemerintah, mereka dapat memberikan manfaat serta kepentingan langsung kepada kelompok piramida sosial ekonomi bawah, pengusaha, dan usaha kecil dan menengah (UKM). Hal ini pada gilirannya diharapkan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial global.⁶¹ IDEA Hub juga dapat meminimalkan ketimpangan sosial ekonomi yang besar. Mengenali potensi Indonesia di bidang UKM, startup dan unicorn besar, sehingga Indonesia berharap negara-negara G-20 bisa meniru Indonesia. Indonesia berusaha memperjuangkan itu di peluang ekonomi warga negara G-20 terdistribusi secara merata. Hal ini tujuannya adalah untuk menaikkan tingkat pendapatan yang disebut secara otomatis akan menaikkan tingkat kesejahteraan di setiap negara secara merata.⁶²

Kepentingan Indonesia di dalam Forum G-20

Dilansir oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyebutkan kepentingan yang akan diperoleh Indonesia berupa terciptanya lapangan kerja dalam jumlah besar berkat pertemuan 157 yang akan diadakan. Selain itu, Indonesia dianggap sebagai negara terbesar di ASEAN dengan perekonomian yang stabil dan sistem politik yang memudahkan Indonesia dalam mengembangkan kebijakan pemulihan ekonomi. Menurut Sri Mulyani Indrawati, jika perekonomian global membaik maka efek rambatnya akan berdampak positif bagi

⁶⁰ Menteri Kominfo, (2018). *Inisiatif Indonesia tentang G20 Inclusion Digital Economy Accelerator (G20 IDEA Hub)*. 24 July. https://www.kominfo.go.id/content/detail/13629/cara-rudiantara-muluskan-usulan-g20-idea-hub/0/sorotan_media.

⁶¹ Menteri Kominfo, (2018). *Indonesia Perjuangkan Akselerasi Pemerataan Akses Ekonomi Rakyat di Negara-negara G20 melalui IDEA HUB*. 25 agustus. https://www.kominfo.go.id/content/detail/14049/siaran-pers-no-197hmkominfo082018-%20tentang-lewat-idea-hub-indonesia-perjuangkan-akses-ekonomidigital-untuk-jutaan-rakyat%20dunia/0/siaran_pers.

⁶² Imannulloh, E. R., & Rijal, N. K. (2022). Upaya Indonesia dalam Mendorong Prioritisasi Perekonomian Negara Berkembang melalui G20: Perspektif Hyper-Globalist. *Indonesian Perspective*. Hal. 13.

Indonesia, seperti penerimaan negara, penerimaan pajak, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta peningkatan ekspor barang.⁶³

Tidak hanya itu, terdapat pula manfaat serta kepentingan strategisnya, yaitu G-20 merupakan forum strategis bagi untuk membahas isu-isu global seperti kesehatan global, stabilitas keuangan dan *climate change*, *showcasing* upaya pemulihan ekonomi Indonesia di masa pandemi COVID-19 dan menyoroti peran kepemimpinan Indonesia dalam pertemuan yang akan mendukung pembentukan kebijakan global.⁶⁴ Selanjutnya manfaat langsung yang dirasakan antara lain peningkatan devisa melalui kunjungan delegasi ke Indonesia, merevitalisasi sektor *hospitality*, mendukung peningkatan pendapatan domestik konsumsi, optimalkan meningkatkan peran UMKM dan menambah lapangan kerja.

Berdasarkan kepentingan yang didapatkan dalam bidang politik, sebagai presidensi G-20, Indonesia dapat mendorong kerja sama dan mencapai hasil nyata di tiga bidang prioritas strategis pemulihan. Hal ini merupakan peluang bagi Indonesia untuk membangun kredibilitas di mata dunia dengan memimpin pemulihan global. Kebijakan luar negeri dan kegiatan diplomatik, reputasi merupakan aset yang sangat berharga, dan menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi untuk menjalin hubungan kerja sama di masa depan.⁶⁵ Sehingga di bidang pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan, keuntungan dari kepresidenan G-20 bagi Indonesia adalah menjadi motor penggerak untuk *menunjukkan "Indonesia is open for business"*.

Hal ini dikarenakan terdapat berbagai *event* yang akan menampilkan perkembangan Indonesia serta potensi investasi di Indonesia. Oleh karena itu, peluang menjadi presidensi G-20 akan memberikan peluang bagi Indonesia untuk menciptakan *multiplier effect* bagi perekonomian daerah karena negara tersebut berkontribusi pada pariwisata, akomodasi, transportasi, dan ekonomi kreatif, serta UMKM lokal. Indonesia dinilai mampu membuktikan kapabilitasnya di kancah internasional, khususnya dalam proses pemulihan ekonomi global. Indonesia juga dianggap berhasil pulih dari krisis akibat pandemi COVID-19, menciptakan banyak lapangan kerja, dan menghasilkan keuntungan di berbagai sektor.⁶⁶

Indonesia berkesempatan menjadi representasi dari negara-negara berkembang.⁶⁷ Pertemuan G-20 di Indonesia tentunya akan menjadi salah satu cara

⁶³ Aida, N. R., & Kurniawan, R. ferri. (2022). *Manfaat Presidensi G20*. Retrieved July 6, 2022, from <https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/27/103156365/apa-manfaatpresidensi-g20-bagi-indonesia?page=all>.

⁶⁴ Gumilang, M. R. (2022). *Manfaat Presidensi G20 bagi Indonesia*. Retrieved from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknljakarta3/bacaartikel/14750/ManfaatPresidensi-G20-Bagi-Indonesia.html>.

⁶⁵ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2022). *Indonesia Usung Semangat Pulih Bersama dalam Presidensi G20*. Retrieved July 8, 2022, from <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3288/berita/indonesia-usung-semangat-pulihbersama-dalam-presidensi-g20-tahun-2022>.

⁶⁶ Putri, A. S. (2020). G20: Mediator untuk Kemajuan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*.

⁶⁷ Warhidatun Maratus Solechah, Sugito. 2023. "Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Sebagai Kepentingan Nasional Indonesia Dalam Presidensi G20." *Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*. Hal. 10.

untuk memperkenalkan budaya, produk unggulan, dan industri pariwisata Indonesia ke dunia internasional, sehingga dapat membantu mendongkrak perekonomian Indonesia. Terpilihnya Indonesia sebagai ketua G-20 menjadi salah satu cara untuk memanfaatkan ilmu dan peluang sebesar-besarnya untuk masa depan Indonesia dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia.

KESIMPULAN

Terdapat beragam upaya Indonesia mempunyai kesempatan untuk mengikuti pelatihan arsitektur ekonomi global yang ditujukan untuk mendukung perekonomian untuk bertahan dari krisis keuangan di masa mendatang. Indonesia pun memainkan peran penting dalam meluncurkan program-program kerja di forum G-20 salah satunya adalah GESF (*Global Expenditure Support Fund*) merupakan sebuah program kerja G-20 yang diusulkan oleh Indonesia.

Pertemuan G-20 di Indonesia tentunya akan menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan budaya, produk unggulan, dan industri pariwisata Indonesia ke dunia internasional, sehingga dapat membantu mendongkrak perekonomian Indonesia. Terpilihnya Indonesia sebagai ketua G-20 menjadi salah satu cara untuk memanfaatkan ilmu dan peluang sebesar-besarnya untuk masa depan Indonesia dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia.

Selain itu, Indonesia dianggap sebagai negara terbesar di ASEAN dengan perekonomian yang stabil dan sistem politik yang memudahkan Indonesia dalam mengembangkan kebijakan pemulihan ekonomi. Sehingga di bidang pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan, keuntungan dari kepresidenan G-20 bagi Indonesia adalah menjadi motor penggerak untuk menunjukkan "*Indonesia is open for business*".

REFERENSI

- Habibah Shobri, A. S. (2022). Strategi Negara-Negara G-20 Dalam Mengantisipasi Ancaman Krisis Ekonomi Global Di Indonesia. *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan*, hal. 5.
- Sugema, I. (2012). Krisis keuangan global 2008-2009 dan implikasinya pada perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*.
- World Health Organization, Coronavirus Disease (Covid-19) Pandemic: Press Conference on Covid 19 and Other Global Health Issues, diakses dari <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>.
- Zubaidah, T., Yendriani, Y., Putri, F. H., & Pangastuti, N. (2021). Krisis ekonomi bangsa Indonesia dimasa pandemi covid-19. *Jurnal Fusion*.
- Voice of America Indonesia. 2021. Ekonomi Indonesia di 2021. 15 Januari. <https://www.voaindonesia.com/a/ekonomi-indonesia-di-2021-diprediksi-krisis-serius-5737622.html/>.
- Yenny, Y. S., Alissa, E., & Suryahartati, D. (2022). Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Perumahan Villa Bogor Indah 6 yang dikelola oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Bogor. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*.
- Yenny, Y. S., Alissa, E., & Suryahartati, D. (2022). Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Perumahan Villa Bogor Indah 6 yang dikelola oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Bogor. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*.
- Dwi, Anugrah. 2023. Penyebab Terjadinya Krisis Ekonomi. 19 Juni. <https://feb.umsu.ac.id/penyebab-terjadinya-krisis-ekonomi/>.
- OCBC NISP. 2023. Krisis Ekonomi, Penyebab, Dampak, dan Cara Mengatasinya. 8 Februari. <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2023/02/08/krisis-ekonomi/>.
- Dwi, Anugrah. 2023. Penyebab Terjadinya Krisis Ekonomi. 19 Juni. <https://feb.umsu.ac.id/penyebab-terjadinya-krisis-ekonomi/>.
- Kemenkeu.go.id. (2022, Maret 22). Retrieved from Draft G-20: <https://www.kemenkeu.go.id/single-page/draft-G-20/#>.
- Urfah, S. (2017). Pengaruh Keanggotaan Indonesia Dalam Forum G-20 Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia (*Doctoral Dissertation, Perpustakaan*).
- Yulius P Hermawan, Wulani Sriyuliani, Getruida H Hardjowijono, Sylvie Tanaga. 2011. "Peran Indonesia dalam G-20." *Proyek Riset G-20*. hal. 5.
- Astuti, W. R. D., & Fathun, L. M. (2020). Diplomasi Ekonomi Indonesia di dalam Rezim Ekonomi G-20 pada Masa Pemerintahan Joko Widodo. *Intermestic: Journal of International Studies*.
- Utami, A. T. (2016). Analisis Efektivitas G-20 Dalam Menangani Krisis Finansial Tahun 2008. *Insignia: Journal of International Relations*.
- Riyanto, A., & Fathoni, M. (2022). Analisis ANT (Actor Network Theory) Dalam Presidensi G-20 Arab Saudi Tahun 2020 Untuk Menghadapi Tantangan Perekonomian Global Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Hubungan Internasional Peradaban*.
- Yanthi, N. P. D. M., Yudhaningsih, N. M., & Pering, I. M. A. A. (2022). Peluang Dan Tantangan SDM Bali Serta Strategi Dalam Menyambut Kegiatan Presidensi G-20. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Sosial (EMBOSS)*.

- Umar S. Bakry, *Pedoman Penulisan Skripsi Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 12.
- Azwardi, *Metode Penelitian* (Banda: Syiah Kuala University Press, 2018), hlm. 103.
- Ahmad Ziyad, M. Roehman Zainur Riedho. 2020. "Konsep Diplomasi Middle Power dalam Multilateralism Era Baru." *Jurnal Hubungan Internasional*.
- Triwibowo, A., & Martha, J. (2021). Diplomasi middle-power Indonesia di masa pandemi. *Indonesian Perspective*.
- Irewati, A., & Kartini, I. (2020). *Potret politik luar negeri Indonesia di era reformasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Denish Pudyal, 2019. Middle Power Diplomacy Analysis. Tribhuvan University. p. 1
- S.L Roy. 1995. *Diplomasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Kusumastuti, R. D. (2023). *Peran Diplomasi Middle power Indonesia dalam Perubahan Iklim Global sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan di Era Kepemimpinan Joko Widodo* (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro).
- Eufronius Suwarman , eds, "Rivalitas Geopolitik Amerika Serikat-Tiongkok di Myanmar," *Journal Asia Pacific Studies*, Vol. 2, No. 2 (2018), hlm.182.
- Robinson, Thomas. (1969). "National Interest" dalam James N. Rosenau, *International Politics and Foreign Policy: A Reader on Research and Theory*. New York: The Free Press, hal.182.
- Anak Agung Banyu Perwira dan DR. Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Hubungan Internasional*, PT. Remaja Rosdakarya Bandung 2005. Hal. 47.
- Daniel S, Papp. 1988. Contemporary International Relations. hal. 29.
- Daniel S, Papp. 1988. Contemporary International Relations. hal. 29.
- Hyndman, James E. 1970/1971. National Interest and The New Look. *International Journal*, Vol. 26, No. 1: pp. 5-18.
- Bainus, A., & Rachman, J. B. (2018). Kepentingan Nasional dalam Hubungan Internasional. *Intermestic: Journal of International Studies*.
- Clinton, W. David. 1986. The National Interest: Normative Foundations. *The Review of Politics*, Vol. 48, No. 4: pp. 495-519.
- Indonesia, CNN. 2022. Mengenal G20: Sejarah, Tujuan, dan Perannya Mengenal G20: Sejarah, Tujuan, dan Perannya. Januari. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220110161907-537-744798/mengenal-g20-sejarah-tujuan-dan-perannya/>.
- Indonesia, CNN. 2022. Mengenal G20: Sejarah, Tujuan, dan Perannya Mengenal G20: Sejarah, Tujuan, dan Perannya. Januari. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220110161907-537-744798/mengenal-g20-sejarah-tujuan-dan-perannya/>.
- Hermawan, Y. P. (2012). Legitimasi, efektivitas dan akuntabilitas G-20 sebagai klub eksklusif dalam pembentukan tata kelola ekonomi global. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*.
- Putri, A. S. (2020). G20: Mediator untuk Kemajuan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*. Hal. 4.
- Putri, A. S. (2020). G20: Mediator untuk Kemajuan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*. Hal. 4.
- Putri, A. S. (2020). G20: Mediator untuk Kemajuan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*. Hal. 5.

- Warhidatun Maratus Solechah, Sugito. 2023. "Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Sebagai Kepentingan Nasional Indonesia Dalam Presidensi G20." *Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*. Hal. 8.
- Larasasati, C., & Natasya, E. D. (2017). Peran Indonesia di G-20: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Hubungan Internasional*.
- Imannulloh, E. R., & Rijal, N. K. (2022). Upaya Indonesia dalam Mendorong Prioritisasi Perekonomian Negara Berkembang melalui G20: Perspektif Hyper-Globalist. Indonesian Perspective. Hal. 11.
- Hermawan, Y. P. (2011). Peran Indonesia dalam G-20. *Proyek Riset G-20*. Hal. 49.
- Indonesia, CNN. 2022. Mengenal G-20: Sejarah, Tujuan, dan Perannya Mengenal G20:Sejarah, Tujuan, dan Perannya. 1 Januari. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220110161907-537-744798/mengenal-g20-sejarah-tujuan-dan-perannya/>.
- Urfah, S. (2017). Pengaruh Keanggotaan Indonesia Dalam Forum G-20 Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia (*Doctoral dissertation, Perpustakaan*).
- Wahyuningsih, W. (2018). Millenium Develompent Goals (Mdgs) dan Sustainable Development Goals (Sdgs) dalam Kesejahteraan Sosial. BISMA: *Jurnal Bisnis dan Manajemen*.
- Kementerian Keuangan, (2020). 4 Agenda Infrastructure Working Group G-20. 17 Maret. <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1144-1366/umum/kajian-opini-publik/4-agenda-utama-infrastructure-working-group-iwg-g20/>.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, (2022). Penetapan Keanggotaan Pokja, Jadwal Pertemuan dan Agenda Prioritas, Mendukung Kesuksesan Rangkaian Presidensi G20. 18 Februari. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4114/determination-of-working-group-membership-meeting-schedule-and-priority-agenda-supporting-the-success-of-the-g20-presidency-series/>.
- Kementerian Keuangan, (2020). 4 Agenda Infrastructure Working Group G-20. 17 Maret. <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1144-1366/umum/kajian-opini-publik/4-agenda-utama-infrastructure-working-group-iwg-g20/>.
- CNBC Indonesia, (2022). Putaran final digital Working Group. 19 September. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220919131353-8-373206/putaran-final-digital-economy-working-group/>.
- CNBC Indonesia, (2022). Putaran final digital Working Group. 19 September. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220919131353-8-373206/putaran-final-digital-economy-working-group/>.
- Pemkot Surakarta, (2022). Peran Aktif Indonesia Dalam G-20. 21 Maret. <https://surakarta.go.id/?p=23682/>.
- Lovina, H. R., Jiajia, G., & Chen, H. (2017). Review of" The Chinese Belt and Road Initiative": Indonesia-China cooperation and future opportunities for Indonesia's port cities development. *Journal of Regional and City Planning*.
- Kementerian PUPR, (2017). Pendanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol dilakukan Melalui BLU LMAN. 5 April. <https://pu.go.id/berita/pendanaan-pengadaan-tanah-jalan-tol-dilakukan-melalui-blu-lman/>.
- Kementerian PUPR. 2023. Kementerian PUPR targetkan 13 Ruas Jalan Tol baru sepanjang 309,78 km beroperasi hingga akhir 2023. 26 Mei. <https://pu.go.id/berita/kementerian-pupr-targetkan-13-ruas-jalan-tol-baru-sepanjang-30978-km-beroperasi-hingga-akhir-2023/>.

- Kompasiana, (2023). Peran Indonesia dalam ekonomi global, tantangan dan dampaknya terhadap perekonomian dunia. 13 April. https://www.kompasiana.com/aru_m00594/64378e92a7e0fa7dbc217262/peran-indonesia-dalam-ekonomi-global-tantangan-dan-dampaknya-terhadap-perekonomian-dunia/.
- Menteri Kominfo, (2018). Inisiatif Indonesia tentang G20 Inclusion Digital Economy Accelerator (G20 IDEA Hub). 24 July. https://www.kominfo.go.id/content/detail/13629/cara-rudiantara-muluskan-usulan-g20-idea-hub/0/sorotan_media/.
- Menteri Kominfo, (2018). Inisiatif Indonesia tentang G20 Inclusion Digital Economy Accelerator (G20 IDEA Hub). 24 July. https://www.kominfo.go.id/content/detail/13629/cara-rudiantara-muluskan-usulan-g20-idea-hub/0/sorotan_media/.
- Menteri Kominfo, (2018). Indonesia Perjuangkan Akselerasi Pemerataan Akses Ekonomi Rakyat di Negara-negara G20 melalui IDEA HUB. 25 agustus. https://www.kominfo.go.id/content/detail/14049/siaran-pers-no-197hmkominfo082018-%20tentang-lewat-idea-hub-indonesia-perjuangkan-akses-ekonomidigital-untuk-jutaan-rakyat%20dunia/0/siaran_pers/.
- Imannulloh, E. R., & Rijal, N. K. (2022). Upaya Indonesia dalam Mendorong Prioritisasi Perekonomian Negara Berkembang melalui G20: Perspektif Hyper-Globalist. *Indonesian Perspective*. Hal. 13.
- Aida, N. R., & Kurniawan, R. ferri. (2022). Manfaat Presidensi G20. Retrieved July 6, 2022, from <https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/27/103156365/apa-manfaatpresidensi-g20-bagi-indonesia?page=all/>.
- Gumilang, M. R. (2022). Manfaat Presidensi G20 bagi Indonesia. Retrieved from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn/jakarta3/bacaartikel/14750/ManfaatPresidensi-G20-Bagi-Indonesia.html/>.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2022). Indonesia Usung Semangat Pulih Bersama dalam Presidensi G20. Retrieved July 8, 2022, from <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3288/berita/indonesia-usung-semangat-pulihbersama-dalam-presidensi-g20-tahun-2022/>.
- Putri, A. S. (2020). G20: Mediator untuk Kemajuan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*.
- Warhidatun Maratus Solechah, Sugito. 2023. "Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Sebagai Kepentingan Nasional Indonesia Dalam Presidensi G20." *Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*. Hal. 10.